

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kestabilan sistem perbankan memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, tak terlepas dari peran perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan kebutuhan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Macet atau tidak berfungsinya dengan baik peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat berakibat macet dan terhambatnya laju perekonomian masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan aspek pendanaan yang disalurkan bank, baik dalam bentuk kredit, pembiayaan ataupun pemodalannya bagi pelaku ekonomi dalam masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah merupakan salah satu bentuk perbankan di Indonesia yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, dimana keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah memiliki arti tersendiri bagi sebagian golongan masyarakat, khususnya golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lantaran kemudahan layanan yang ditawarkan bank dalam mendukung usaha masyarakat. Macet dan tidak berfungsinya dengan baik peran intermediasi yang dilakukan oleh BPR Syariah dapat berakibat buruk bagi kelancaran kegiatan ekonomi UMKM yang merupakan salah satu mitra terbesar BPRS. Oleh karenanya kestabilan sistem BPR Syariah mengambil peranan penting dalam mendukung kestabilan ekonomi masyarakat mengingat sebagian besar

pelaku usaha dalam masyarakat adalah golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah memiliki tujuan dan karakteristik yang mirip dengan beberapa Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu pembangunan komersial dan masyarakat, artinya Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk melayani masyarakat (Bank Dunia, 2013 : 2-3). Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah mengambil peran penting dalam melayani masyarakat, khususnya wirausahawan skala kecil di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang umumnya tidak terjangkau oleh bank komersial.



Sumber : www.ojk.go.id

Gambar 1.1
Pembiayaan BPR Syariah di Indonesia 2010 -2020

Berdasarkan gambar 1.1. menunjukkan bahwa terjadi trend kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia

tahun 2010 – 2020, dengan golongan pembiayaan yang rata-rata hampir 50% lebih didominasi golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan obyek pembiayaan BPRS.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah dalam membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di sektor riil. Pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan dana berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003). Pembiayaan (*Financing*) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank dikarenakan pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan syariah, dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan diperoleh bank (Arifin, 2009:243).

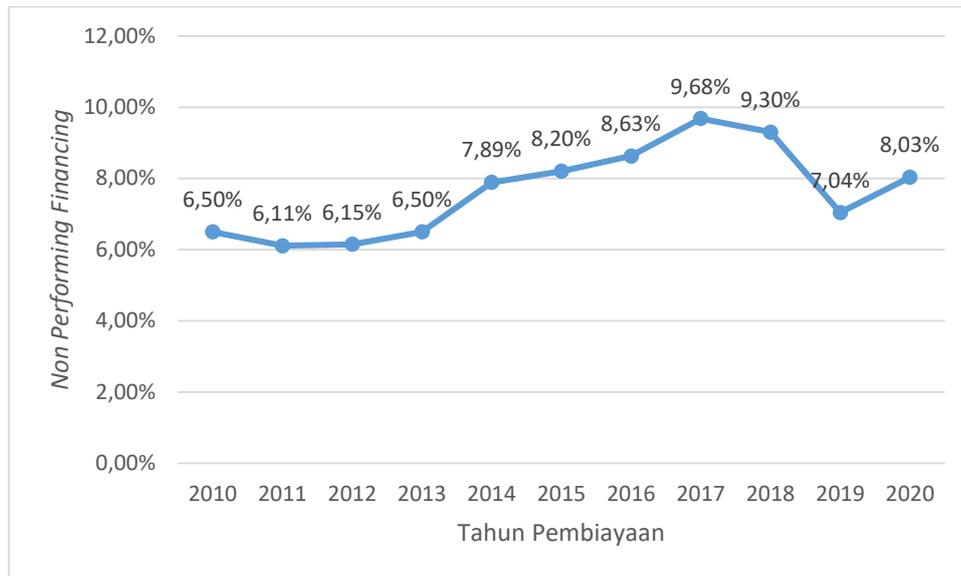
Aset bank dalam bentuk pembiayaan berpotensi menjadi salah satu sumber risiko apabila dalam penyalurannya tidak disertai prinsip kehati-hatian atau *prudent* (Susilo, 2017) sehingga Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah yang dalam satu fungsi bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan beresiko terdampak risiko pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi bank (Ibrahim & Rahmati, 2017). Risiko pembiayaan atau risiko kredit dalam istilah

konvensional didefinisikan sebagai resiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga berakibat buruk pada kualitas pembiayaan bank.

Kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima golongan pembiayaan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Pasal 4 SK.Dirjen BI No. 30/267/KEP/DIR). Pembiayaan nonlancar terdiri dari kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Peningkatan jumlah pembiayaan non lancar atau pembiayaan bermasalah berdampak kepada peningkatan *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang salurkan. Batas aman NPF BPR Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/PBI/DPbs Tahun 2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (TKS-BPRS) adalah sebesar 7%.

Data menunjukkan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) BPR Syariah di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir periode 2010 - 2020.



Sumber : www.ojk.go.id

Gambar 1.2
NPF BPR Syariah di Indonesia 2010-2020

Berdasarkan gambar 1.2 tampak terjadi trend peningkatan NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia sejak tahun 2014 dan puncak tertinggi adalah pada tahun 2017 dengan nilai NPF mencapai 9,68%, lebih tinggi dari batas aman NPF BPR Syariah sebesar 7% (SE. Bank Indonesia No. 9/29/PBI/DPBs Tahun 2007).

Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) BPR Syariah mengindikasikan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami BPR Syariah dan berpotensi buruk bagi kesehatan BPR Syariah karena terkait pembentukan dana cadangan kerugian bank yang pada gilirannya menjadi lebih besar, berimbas pada perolehan laba usaha bank yang menurun dan pembentukan tambahan modal bank menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK), tingginya *Non Performing Financing* (NPF) berdampak buruk bagi perolehan bagi hasil yang

rendah sehingga nasabah berpotensi pindah ke bank atau investasi lain yang lebih menguntungkan. Yulianto dan Solikhah (2016) mengungkapkan bahwa jika NPF bank meningkat maka akan terjadi penurunan jumlah simpanan nasabah karena keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah berkurang lantaran takut dananya tidak dapat dikembalikan oleh bank atau mendapatkan imbal hasil kecil dan kurang menguntungkan. Tingginya NPF bank yang terus berlarut dan tidak segera ditangani dengan baik dapat berakibat buruk pada kolaps (bangkrut) nya bank. Oleh karenanya penting dilakukan langkah-langkah strategis guna mengatasi atau meminimalisir terjadinya potensi pembiayaan bermasalah yang dialami BPR Syariah di Indonesia.

Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan atau kredit bermasalah pada perbankan umumnya dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal disebabkan kegiatan operasional perbankan itu sendiri dan faktor eksternal disebabkan oleh makro ekonomi (Auliani, 2016).

Pertumbuhan kredit atau pembiayaan merupakan factor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah pada bank dan berujung krisis perbankan. Krisis perbankan besar yang tercatat dalam 30 tahun terakhir sebagaimana terjadi di Chile 1982 (Oberfield, 2013), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia yang disebut *The Nordic Banking Crisis* pada awal 1990-an (Schweiger, 2014), krisis Meksiko 1994 (Sosa & Ortiz, 2015), krisis keuangan Asia 1997 (Joe & Oh, 2018) dan krisis kredit hipotek Rakyatime di Amerika Serikat pada tahun 2008 (Flavin & Sheenan, 2015) dan krisis utang Eropa 2010 - 2013 (Keddad & Schalck, 2020) adalah berawal dari periode pertumbuhan kredit massif yang

berlebih dan tak terkendali (*credit boom*). Keeton (1999) dalam Ghosh (2015) mengungkapkan bahwa peningkatan pertumbuhan kredit berimplikasi pada peningkatan kerugian kredit, sejalan dengan sipahutar (2007) yang mengungkapkan bahwa bank dengan jumlah pinjaman lebih besar berpotensi menanggung resiko kredit yang lebih besar. Hal ini dapat terjadi ketika bank meningkatkan penawaran kreditnya dengan mencoba memberikan kelonggaran mengenai standar kredit, atau melakukan berbagai kecurangan lainnya, sehingga meskipun terkesan bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik karena kreditnya banyak tersalurkan, namun debitur yang tidak kompeten hanya akan membawa masalah kredit macet bagi bank yang bersangkutan. Hal ini adalah sebagaimana yang diungkapkan Karmila (2017) dan Saputro (2019) bahwa pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan (NPL)*.

Adapun factor eksternal yang bersumber dari kondisi makro, Bofondi dan Ropele (2011) mengungkapkan bahwa perubahan kondisi makroekonomi umumnya memengaruhi kualitas kredit perbankan, sejalan dengan Joseph et al. (2012) yang mengungkapkan bahwa faktor makro ekonomi lazim menyebabkan kredit macet pada perbankan, Festic & Beko (2008) mengungkapkan bahwa setiap tekanan dari faktor makroekonomi merupakan sumber risiko sistemik yang memengaruhi kinerja sektor perbankan yang dinyatakan sebagai risiko *Non Performing Loan (NPL)* terhadap total kredit.

Aviliani (2015) menyebutkan bahwa makro ekonomi umumnya dapat dinilai melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga. Kondisi makro ekonomi yang kondusif berdampak pada kenaikan harga asset dan nilai kolateral

yang pada gilirannya akan memperbaiki neraca bank dan perusahaan sehingga mendorong peningkatan permintaan dan penawaran kredit/pembiayaan (Utari et al, 2012: 5). Pertumbuhan kredit cenderung meningkat ketika perekonomian berada dalam fase ekspansi (*boom*) dan cenderung melambat ketika perekonomian berada dalam fase menurun (*bust*) disebut prosiklikalitas kredit (Bank Indonesia, 2015). Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan lead dari pertumbuhan kredit.

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan variabel makro yang kerap digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi, PDB merupakan nilai pasar dari total semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan PDB menunjukkan peningkatan pendapatan individu dan perusahaan, oleh karena itu kemampuan untuk membayar hutang (kredit) meningkat sehingga berpotensi menurunkan NPF (Ahmad & Bashir, 2013). Hal ini sejalan dengan temuan Bofondi dan Ropele (2011), Endah (2016), Indra (2018) yang mengungkapkan bahwa GDP berpengaruh negative terhadap NPF. Berbeda dengan Novi (2016) dan Alfaro (2015) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan PDB yang juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan ekspektasi tinggi bagi bank dalam menilai kemampuan bayar nasabah sehingga bank kurang waspada dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sehingga berpotensi menaikkan NPF.

Inflasi merupakan kondisi makro dimana terjadi kenaikan harga barang-barang secara umum di pasar dan berlangsung terus menerus, diikuti dengan

semakin turunnya nilai riil (intrinsik) mata uang negara (Khalwaty, 2000). Tingginya inflasi dapat berdampak negatif pada penurunan daya beli masyarakat, yang dapat menyebabkan tingkat penjualan di perusahaan menurun. Jika level penjualan di perusahaan menurun maka akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh perusahaan juga menurun sehingga pengembalian yang diperoleh perusahaan juga akan turun. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan pada perusahaan dalam pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh bank. Gangguan kredit/pembiayaan cicilan berpotensi menaikkan rasio NPF yang berarti kualitas pembiayaan bank memburuk (Taswan, 2006), sebagaimana diungkapkan Indra (2018), Wanri (2020) bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF. Di sisi lain Andreani (2016) mengungkapkan bahwa ketika terjadi inflasi, masyarakat cenderung mengalami kesulitan keuangan sehingga tingkat pinjaman bank berkurang dan kredit macet berkurang, sejalan dengan Saputro (2019) dan Klein (2013) yang mengungkapkan bahwa riil nilai pembayaran utang cenderung menurun dengan inflasi yang lebih tinggi, sehingga menurunkan NPL.

Suku bunga merupakan salah satu variable makro yang mempengaruhi karena secara tidak langsung suku bunga merupakan benchmark dalam menentukan ekuivalen tingkat bagi hasil maupun margin pada akad jual-beli yang dilakukan bank syariah (Fauziah, 2015). Ketika suku bunga bank naik, maka terjadi peningkatan daya saing bank syariah dimana nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank syariah (profit/loss sharing) mampu bersaing dengan tingkat bunga pinjaman bank konvensional yang meningkat. Hal ini berakibat masyarakat cenderung memilih melakukan pinjaman atau pembiayaan pada bank syariah yang biaya

dananya dianggap lebih rendah (Kasmir, 2011) sehingga menyebabkan pembiayaan di bank syariah meningkat dan berimbas manikkan NPF, sebagaimana diungkapkan Ibrahim& Rahmati (2017) bahwa semakin besar alokasi pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi bank. Pendapat tersebut sejalan dengan Indra (2018), Rindang (2019) dan Marwan (2019) yang mengungkapkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap NPF/NPL. Berbeda dengan Putri (2016) yang menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga berakibat masyarakat enggan meminjam dana kepada bank sehingga menurunkan pembiayaan bermasalah lantaran permintaan pembiayaan yang rendah, sebagaimana diungkapkan Poetry dan Sanrego (2011), Irum (2012) bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah (NPF/L).

Nilai tukar (kurs) mata uang juga merupakan variable makro dimana nilai tukar (kurs) didefinisikan sebagai harga dari satu mata uang dalam mata uang negara lainnya (Sukirno,2004:358). Ketika mata uang melemah (terdepresiasi) maka keberhasilan pengusaha cenderung terhambat lantaran biaya produksi yang meningkat, khususnya yang terkait dengan barang-barang impor. Peningkatan biaya produksi berpengaruh pada penurunan pendapatan yang diperoleh pengusaha dan berimbas pada kemampuan bayar hutang pengusaha (debitur) menurun sehingga berpotensi menaikkan NPF. Hal ini adalah sebagaimana diungkapkan Indra (2018) bahwa depresiasi kurs berkontribusi mendorong kenaikan NPL maupun NPF

Krisis ekonomi tahun 2008 yang pernah melanda Indonesia merupakan rentetan krisis global yang bermula di Amerika serikat dan menyebar ke berbagai

negara di dunia karena tersendatnya aliran pinjaman antar bank dan transaksi perdagangan internasional yang terhambat, salah satunya adalah pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang. Krisis keuangan tahun 1998 yang jauh lebih hebat sebelumnya, juga dipicu guncangan eksternal melalui nilai tukar yang terdepresiasi tajam sehingga berdampak pada instabilitas perbankan Indonesia dan berujung krisis multi dimensional.

Pelajaran berharga bisa diambil terkait pentingnya mitigasi resiko bagi perbankan guna mengantisipasi serta meminimalisir kemungkinan dampak akibat kondisi krisis, mengingat instabilitas yang terjadi pada sector perbankan berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat pada bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, membuat macet dan turunnya pertumbuhan ekonomi, serta membuat biaya pemulihan akibat krisis menjadi sangat besar, tak terkecuali bagi Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sector riil melalui focus pembiayaan yang disalurkan pada golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Terkait upaya pengukuran potensi resiko yang mungkin terjadi akibat goncangan situasi krisis, metode stress test dapat digunakan oleh perbankan termasuk untuk mengukur potensi resiko kredit atau pembiayaan. Jones et al. (2004) mengungkapkan bahwa stress test merupakan metode untuk mengukur stabilitas sistem keuangan melalui perhitungan risiko kredit. Stress tes merupakan aktifitas kunci dalam manajemen resiko. (Jurion, 2009: 266). Stress tes digunakan untuk melawan risiko, dengan menggunakan berbagai skenario dan sensitivity analysis untuk menguji seberapa kuat objek terkait mampu bertahan. Stress tes bertujuan

mengidentifikasi adanya potensi kerentanan. Stress tes adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi dan mengatur situasi yang dapat menyebabkan kerugian luar biasa, dalam hal ini stress test digunakan untuk menilai dan mengevaluasi profil risiko dari suatu lembaga. Lebih lanjut Moretti et al. (2008) menjelaskan bahwa selama satu dekade *International Monetary Fund* (IMF) menggunakan stress test untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan sistem keuangan suatu negara. Oleh karena itu, metode stress test penting digunakan sebagai upaya mitigasi resiko sistem perbankan akibat guncangan situasi krisis.

Beberapa temuan studi terdahulu tidak tampak menunjukkan konsistensi dalam mengungkapkan pengaruh factor pertumbuhan kredit atau pembiayaan dan makro ekonomi terhadap kualitas pembiayaan atau kredit perbankan yang diprosikan dengan *Non Performing Financing/Loan* (NPF/L). Karmila (2017) dan Saputro (2019) mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap NPL, bersebrangan dengan Harahap (2017) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit berpengaruh negatif terhadap NPL. Adapun variabel pertumbuhan GDP menurut Novi (2016) berpengaruh positif terhadap NPF, berbeda dengan Endah (2016) dan Indra (2018) yang mengungkapkan bahwa GDP berpengaruh negative terhadap NPF, sedangkan Wanri (2020), Dewi (2020), dan Romadhoni (2017) mengungkapkan bahwa GDP tidak berpengaruh terhadap NPF. Inflasi menurut Wanri (2020), Indra (2018) berpengaruh positif terhadap NPF sedangkan menurut Romadhoni (2017), Dewi (2020) dan Rindang (2019) inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF BPR Syariah manfaat. Suku bunga menurut Indra (2018), Rindang (2019) dan Marwan (2019) berpengaruh positif terhadap

NPF/NPL, berbeda dengan putri (2016) yang mengungkapkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap NPF, sedangkan menurut Wanri (2020) suku bunga tidak berpengaruh terhadap NPF. Nilai tukar menurut Romadhoni (2017) berpengaruh positif terhadap NPF sedangkan menurut Endah (2016) dan sherly (2019) nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPF. Melihat hasil temuan yang inkonsisten tersebut maka penulis tertarik melakukan kajian lebih lanjut terkait factor yang mempengaruhi NPF BPRS di Indonesia berikut scenario stress test kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia, mengingat belum penulis dapati penelitian terkait *stress test* kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia sebagaimana yang penulis maksudkan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini mengambil rentang waktu 10 tahun terakhir periode tahun 2010 hingga 2020, karena dalam kurun waktu tersebut terdapat track peningkatan NPF yang cukup tinggi melampaui batas toleransi NPF 7% yang ditentukan oleh regulator, disamping kurun waktu 10 tahun dipandang sebagai waktu yang cukup untuk mengkaji trend pertumbuhan kredit atau pembiayaan dan perkembangan kondisi makro ekonomi terkait, berikut pengaruhnya terhadap kualitas pembiayaan BPR Syariah di Indonesia, dengan mengambil NPF (*Non Performing Financing*) sebagai proksi dari kualitas pembiayaan, sedangkan factor makroekonomi diproksikan dengan pertumbuhan GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar (kurs) mata uang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah–masalah yang diteliti pada penelitian ini meliputi :

1. Apakah pertumbuhan pembiayaan berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia ?
2. Apakah pertumbuhan GDP berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia ?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia ?
4. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia ?
5. Apakah nilai tukar (kurs) mata uang berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia ?
6. Apakah pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar (kurs) mata uang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia ?
7. Bagaimana dampak guncangan berbasis scenario pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar (kurs) mata uang berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Menguji pengaruh pertumbuhan pembiayaan terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia
2. Menguji pengaruh pertumbuhan GDP terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia
3. Menguji pengaruh inflasi terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia
4. Menguji pengaruh suku bunga terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia
5. Menguji pengaruh nilai tukar (kurs) mata uang terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia
6. Menguji pengaruh pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar (kurs) mata uang secara bersama-sama terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia
7. Mendeskripsikan dampak goncangan berbasis scenario pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar (kurs) mata uang berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini meliputi :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen perbankan, khususnya terkat penelitian stress tes kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini meliputi :

1. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan gambaran komprehensif terkait pengaruh pertumbuhan pembiayaan dan makroekonomi terhadap kualitas pembiayaan, berikut stress tes kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi bagi bank dalam menyusun alternative strategi pengembangan sekaligus mitigasi resiko dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis .

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pemahaman mengenai karakter, kesehatan dan kekuatan dari kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia sehingga dapat

dijadikan referensi bagi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan di Indonesia dalam menyusun regulasi yang tepat untuk pengembangan sekaligus mitigasi resiko pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis.

3. Bagi perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan sekaligus referensi bagi pengembangan ilmu manajemen perbankan, khususnya terkait topik stress tes kualitas pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara sistematis terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang saling terkait dalam satu kesatuan komprehensif. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian terkait, landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi dan sampel, serta teknis analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi subyek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan implikasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran